BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di segala bidang, khususnya di bidang industri.

Menurut Zairin Harahap yang dimaksud dengan:

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah istilah yang dipopulerkan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) lewat publikasinya yang sangat terkenal *Our Common Future* (Masa Depan Bersama). WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, generasi sekarang mempunyai peranan penting untuk melestarikan fungsi lingkungan, sehingga generasi mendatang mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak penuh mereka.¹

Pengaturan mengenai permasalahan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pengaturan terhadap lingkungan hidup di Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 25 Februari 1982 yaitu

¹ Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cet. 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2020 hal. 5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UULH). Pada tanggal 19 September 1997 UULH dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH), dengan alasan antara lain UULH yang perlu disempurnakan. Dan pada tahun 2009 bulan Oktober lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH).

Pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan kondisi lingkungan dan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Hal yang harus dipahami dalam pembangunan tidak hanya diorientasikan pada pembangunan fisik dan ekonomi saja, melainkan juga harus diorientasikan tentang persoalan dan penyelesaian dampak dari pembangunan yang dilaksanakan terhadap kesehatan baik dalam kesehatan manusia maupun kesehatan lingkungannya.²

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) UUPPLH “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Maka dari itu, baik negara, pemerintah, dan seluruh pejabat yang berwenang berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup,

² Prima Hayati Lubis, “Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit,” *Mendapo, Journal of Administration Law*, Vol 1 No. 2, 2020, hal. 101.

baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang.³ Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang harus dijaga ialah daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Persoalan saat ini, kegiatan manusia seringkali mengakibatkan perubahan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut. Salah satu faktor yang menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan saat ini adalah menurunnya atau tidak dapat dijaganya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu dapat terjadi baik secara alam maupun oleh perbuatan manusia itu sendiri. Secara alam, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena terjadinya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Beberapa peristiwa alam yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan, antara lain dapat disebabkan karena gempa bumi, banjir, gunung meletus dan tanah longsor, yang tidak dapat diduga. Tetapi juga dapat terjadi karena perbuatan manusia seperti pembuangan limbah di alam ataupun di media lingkungan.

Berbagai aktivitas usaha dan/atau kegiatan manusia seperti kegiatan industri telah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi kawasan sekitar industri yang cukup mengkhawatirkan, sebagai akibat dari pembuangan limbah ke lingkungan tersebut. Walaupun pada kenyataannya Peraturan Perundang-undangan telah mengatur larangan membuang limbah ke

³ Serafica Gishca, "*Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator*" (kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan-tujuan-dan-indikator?page=all, diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 20:03)

lingkungan sekitar. Beban biaya yang tinggi menjadi alasan para pelaku usaha dan/atau kegiatan enggan untuk melakukan pengolahan limbah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga), yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan. Limbah yang berasal dari kegiatan industri adalah limbah yang terproduksi bersama dengan proses produksi, dimana produk dan limbah hadir pada saat yang bersamaan.⁴ Limbah industri dapat dibagi menjadi empat bagian diantaranya; limbah cair, limbah padat dan limbah gas dan Limbah B3.

Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan manusia, serta makhluk hidup lainnya⁵. Suatu limbah yang tergolong sebagai limbah B3, yaitu jika ia memiliki sifat-sifat tertentu diantaranya bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, bahan yang menimbulkan korosif, buangan oksidasi, buangan infeksius dan bahan toksik atau beracun. Dilihat dari sifatnya saja sudah terlihat betapa berbahayanya limbah industri ini, jika ditambah dengan kuantitasnya yang begitu besar, bisa dibayangkan bagaimana tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Berdasarkan Pasal 99

⁴ Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri*, Edisi I, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2020, hlm. 23.

⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan Limbah B3 yang baik dan tepat, yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan Limbah B3 dalam rangka menjaga dan mengendalikan Limbah B3 tersebut agar tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan sekitar.

Permasalahan mengenai pencemaran limbah B3 dapat berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Proses pencemaran limbah B3 khususnya bidang industri pengasapan karet dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Proses secara langsung artinya bahan pencemar tersebut langsung berdampak pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta mengganggu keseimbangan ekologis baik air dan tanah. Sedangkan proses pencemaran limbah B3 secara tidak langsung yaitu beberapa zat kimia yang bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum administrasi negara yang dinilai lebih efektif dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet tersebut.

Penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penerapan sanksi administrasi yang terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.⁶ Berdasarkan UUPPLH, kewenangan pengawasan dan penerapan sanksi

⁶ Amelia M.K. Panambunan, "Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 2, Februari 2016, Hal. 97

merupakan kewenangan yang di delegasikan oleh menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota kepada pejabat instansi/teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dua perusahaan industri yang ada di Kota Jambi, yaitu perusahaan industri pengasapan karet, lokasi pertama berada RT 12 RW 4 Kelurahan Arab Melayu milik PT. Angkasa Raya Jambi dan di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan milik PT. Djambi Waras. Keberadaan dua perusahaan ini, seharusnya memberikan kontribusi yang positif, dan peningkatan ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Namun hal ini bertolak belakang dengan lokasi kedua perusahaan tersebut yang rawan terkena bencana banjir ketika air sungai Batanghari pasang dan salah satunya mendekati permukiman warga yaitu milik PT. Angkasa Raya Jambi.

Kondisi yang terlihat dari bangunan perusahaan industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya dalam keadaan berkarat, mengeluarkan kebisingan, getaran dan bau yang tidak sedap sebagai akibat dari limbah yang dihasilkan, bahkan terdapat tumpukan limbah padat (tatal) di depan rumah warga dan di sepanjang jalan menuju arah Kelurahan Arab Melayu. Dari kondisi dan pengamatan yang dilakukan memunculkan adanya dugaan atau asumsi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pengolahan limbah B3 yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan lokasi penyimpanan Limbah B3 sebagai rangkaian tindakan pengolahan Limbah B3.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat dikatakan bahwa masih banyak peluang untuk terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan industri karet tersebut, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum administrasi berupa pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Jambi sebagai pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Walikota Kota Jambi untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 Industri pengasapan karet berdasarkan Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pengolahan Limbah B3 Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi?
2. Bagaimana tindakan hukum pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah B3?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengolahan Limbah B3 dari suatu usaha dan/atau kegiatan industri pengasapan karet di Kota Jambi yang menghasilkan Limbah B3.
- b. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan pemerintah (pejabat yang berwenang) terhadap pelaku pelanggaran terhadap pengolahan Limbah B3.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teori untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah wawasan Hukum Administrasi Negara khususnya hukum Lingkungan terhadap mekanisme Pengolahan Limbah B3 pada usaha dan/atau kegiatan Industri Pengasapan Karet.
- b. Manfaat secara praktis, untuk memberikan informasi tentang tindakan hukum pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketentuan industri pengasapan karet di Kota Jambi dalam melakukan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk menghindari terjadinya kerancuan atau penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini beberapa konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut.

1. Penegakan Hukum Administrasi

Konsep penegakan hukum administrasi (*Eenzijdige Handhaving Rech door Overheid*) merupakan kewenangan administrasi negara (pemerintah) untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.⁷ Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan suatu keadilan. P. Nicolai dan kawan-kawan mengatakan bahwa sarana penegakan hukum administrasi negara berisikan tentang pengawasan dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.⁸

2. Pengolahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, yang dimaksud dengan Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau beracun. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengolahan adalah suatu proses atau cara, ataupun perbuatan dalam mengolah sesuatu.

⁷ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217

⁸ Ibid

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Berdasarkan UUPPLH, Limbah B3 adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan dan/atau usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Menurut Mukhlisoh Limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang tidak sering dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat menyebabkan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengelolaan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transport, pengolahan ataupun dalam pembuangannya.⁹

4. Industri Pengasapan Karet

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 Industri Pengasapan Karet (*Crumb Rubber*) merupakan jenis usaha, perusahaan dan industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan besar terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

E. Kerangka Teoritis

Pada penyelesaian penulisan skripsi ini dipergunakan beberapa teori yang akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dikaji yakni sebagai berikut.

⁹ Tentrami Hayuning Ichtiakhri dan Sudamarji, "Pengelolaan Limbah B3 Keluhan Kesehatan Pekerja di PT. Inka (Persero) Kota Madiun." *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol 8 No. 1, Januari 2015, hal. 119.

1. Teori Kewenangan

Kewenangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Dalam konsep hukum administrasi dengan tegas dikemukakan, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pemerintah (penguasa) dengan warga masyarakat merupakan hubungan hukum sepihak. Kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini diperoleh melalui tiga cara, yakni: atribusi, delegasi, dan mandat. Sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni terikat pada masa tertentu, tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Philipus M. Hadjon setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa sewenang-wenang. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.¹⁰

Berdasarkan kepustakaan hukum administrasi, dijelaskan seperti apa tindakan atau perbuatan administrasi negara dengan melihat pada tiga

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 91.

aspek sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak ada wewenang bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan tersebut.
- b. Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak dipenuhinya prosedur untuk sampai kepada pengambilan keputusan melakukan suatu perbuatan atau tindakan administrasi negara tertentu.
- c. Penyalahgunaan wewenang yang timbul karena substansi dari pembuatan administrasi negara pejabat yang bersangkutan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Teori Tindakan Pemerintah

Pemerintah adalah subyek hukum, sebagai *dragger van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek hukum, pemerintah sebagaimana subyek hukum lainnya dapat melakukan tindakan-tindakan.¹¹ Sehingga Hadjijono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuurorgaan*) dalam menjalankan pemerintahan.

Tindakan pemerintah dalam konsep hukum administrasi dibagi menjadi dua, yaitu tindakan materiil/faktual (*fietelikje handeling*) dan

¹¹ Sofyan Hadi dan Tomy Michael, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara." Jurnal Cita Hukum. Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hal. 385

tindakan hukum (*rechtshendeling*). Tindakan hukum (*rechtshendelingen*) berdasarkan sifatnya merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban). Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang berarti tindakan tersebut harus dimaksudkan memiliki akibat hukum yang terkait antara badan atau pejabat pemerintahan dengan satu atau lebih orang atau badan hukum.¹²

Tindakan hukum pemerintah terbagi menjadi dua bagian, diantaranya tindakan hukum menurut hukum publik dan tindakan hukum menurut hukum privat. Tindakan hukum menurut hukum publik ada yang bersegi satu (*Eenzijidige Publiek Rechtshandelingen*) dan ada tindakan hukum publik yang bersegi dua (*Tweezijidige Publiek Rechtshandelingen*). Tindakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah ini berupa ketetapan (*beschikking*) atau keputusan (*regeling*). Sedangkan tindakan hukum publik bersegi dua, misalnya perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah.¹³

3. Teori Penegakan Hukum Administrasi

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta

¹² A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hal. 186.

¹³ Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 1 No. 1, Februari 2015, hal. 49

didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁴ Konsep penegakan hukum administrasi negara merupakan kewenangan administrasi untuk meluruskan terjadinya pelanggaran hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Tujuan dari penegakan hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum (*legal order*) dalam rangka melindungi kepentingan umum. Penegakan hukum administrasi negara dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penerapan hukum secara preventif dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum secara represif dilakukan melalui penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Sanksi dalam hukum administrasi negara merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara. jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi:

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Denda administrasi;
- d. Uang paksa (*dwangsom*).¹⁵

¹⁴ Atika Thahira, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan di Tinjau dari Konsep Negara Hukum", Jurnal Cendikia Hukum, Vol 5 No. 2, Maret 2020, hal. 265.

¹⁵ Riawan Tjandra, Op. Cit., Hal. 218

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penyusunan skripsi ini maka penelitian ini dilakukan di lingkungan kawasan kegiatan industri pengasapan karet milik PT Angkasa Raya Jambi yang terletak di RT 12 RW 4 Kelurahan Arab Melayu Kota Jambi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, sebagaimana dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Ilmu Hukum” bahwa:

Dari ciri-ciri pengkajian atau penelitian ilmu hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya, hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris ilmu pengetahuan sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁶

Jadi penelitian ini akan dilakukan dengan mendatangi lokasi yang dijadikan sasaran penelitian yang dikaitkan dengan pengawasan pemerintah daerah dan penerapan sanksi administratif tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Industri Pengasapan Karet yang ada di Kota Jambi.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah penelitian deksriptif analitis. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan kondisi yang terjadi dilapangan dan kemudian menganalisa hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus tentang penegakan hukum administrasi negara terhadap pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun industri pengasapan karet di kota Jambi.

4. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara. Dalam hal ini peneliti langsung kelapangan yang dijadikan objek penelitian dengan melakukan wawancara bersama sampel dan informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam penulisan skripsi ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum adalah:

(1) Bahan Hukum Primer

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (b) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- (c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (e) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- (f) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (g) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat para ahli hukum (doktrin), buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang diantaranya tertuang di dalam buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Populasi, Sampel dan Informan Penelitian

a. Populasi Penelitian

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama. Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Ketua RT dalam satu kelurahan di Arab Melayu yang berjumlah 12 (Dua Belas) Orang.

b. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan *purposive sample*, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi berdasarkan pada alasan yang logis. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu Ketua RT 11 dan RT 12 Kelurahan Arab Melayu yang berada dekat dengan lokasi Industri Pengasapan Karet milik PT. Angkasa Raya Jambi.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Ibid.*, Hal. 145

c. Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi Informan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yaitu Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi (PPLHD) yang berjumlah 1 (satu) orang.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu data yang tersedia diolah untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh yang bersifat khusus.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara umum gambaran penulisan skripsi ini, maka penulis meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

¹⁸ Ibid., Hal. 174

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain mengenai kewenangan, tindakan hukum, dan tinjauan mengenai pengolahan limbah B3.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang mekanisme pengolahan limbah B3 industri pengasapan karet, serta bagaimana tindakan hukum pemerintah terhadap pelaku pelanggaran pengolahan limbah B3 hasil industri pengasapan karet.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas pada bab pembahasan.